



## **PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**



**PADANG PANJANG**

**2017**

## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1 Latar Belakang**

Teknologi informasi, yang sebenarnya merupakan suatu perpaduan sejumlah teknologi, telah memungkinkan terjadinya internetworking yang menyebabkan faktor jarak dan waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir dari satu tempat yang lain dengan kecepatan cahaya dan dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi, koordinasi dan kolaborasi yang mampu menghasilkan tindakan-tindakan dengan pertimbangan keuntungan skala global.

Melalui internetworking tersebut dapat disebarluaskan dalam jumlah besar secara gencar untuk membentuk opini public secara global terhadap suatu tindakan yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk menghasilkan manfaat yang sepenuhnya dikendalikan oleh penyebar informasi. Teknologi informasi telah membawa dunia menuju ke era informasi, dimana informasi merupakan salah satu sumber daya paling penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk tujuan-tujuan tertentu yang menguntungkan pelakunya. Dengan kecepatan pengumpulan dan penyebarannya yang sangat tinggi, informasi sangat mungkin difungsikan sebagai suatu senjata strategis dalam memenangkan persaingan global.

Informasi yang dikelola dan dikomunikasikan dengan baik akan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi yang melakukannya. Sejalan dengan perkembangan teknologinya, peran komunikasi publik menjadi semakin dominan dalam usaha mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, membentuk opini publik dan menjalankan fungsi-fungsi demokrasi dalam bernegara. Kegiatan komunikasi massa yang dilakukan untuk penyebaran informasi melalui segala macam media dengan memanfaatkan teknologi informasi seoptimal mungkin akan menjalin keterhubungan antar elemen masyarakat.

Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Padang Panjang yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Untuk itu, sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan.

Menindaklanjuti amanat peraturan perundang-undangan, yang sejalan dengan kebutuhan terhadap penyiapan arah dan langkah pencapaian yang akan diwujudkan dalam tahapan pembangunan lima tahunan, dan seiring dengan ditetapkannya RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang memutuskan pentingnya menyiapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 2 tahun yang memuat visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan program, dan indikatif kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018 yang bersifat indikatif.

Pada akhirnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2017 – 2018 diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2017 – 2018 ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lampiran IV)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 2 seri D.2).
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah.
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2017 – 2018 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2013 – 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2017 - 2018.
2. Menetapkan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2017 - 2018.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang (Rencana Kerja Tahunan)
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang baik tahunan maupun periode lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2017 – 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

#### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG**

- 4.1 Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan OPD

## **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

## **BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

## **BAB VII.PENUTUP**

### **LAMPIRAN**

**TABEL 5.1** Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

**TABEL 6.1** Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD

## **DAFTAR ISI**

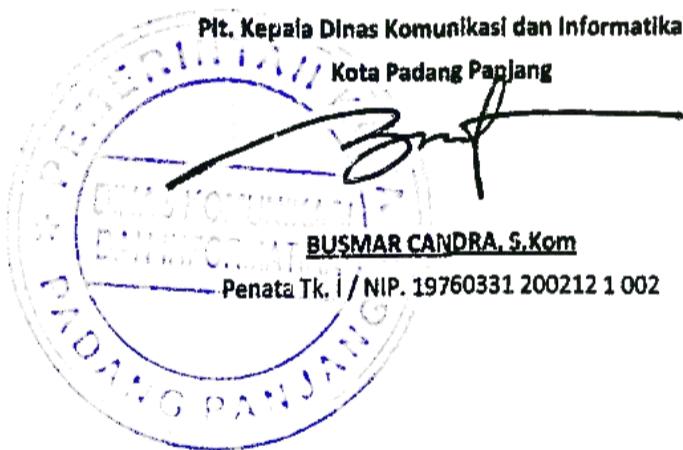
Daftar Isi	i	
Kata Pengantar	ii	
BAB I	Pendahuluan	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang	6
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2	Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang	10
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang	11
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	13
BAB III	Isu-Isu Strategi Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	14
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	14
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	14
3.3	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi	15
3.4	Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	17
3.5	Analisis Isu-Isu Strategis	18
BAB IV	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	20
4.1	Visi dan Misi	20
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD	21
4.3	Strategi dan Kebijakan SOPD	26
BAB V	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif	29
BAB VI	Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Yang Mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD	31
BAB VII	Penutup	34

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdullillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena curahan nikmat dan rahmat-Nya pada kita semua, saat ini kita masih dapat terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kota Padang Panjang yang kita cintai ini, dengan kasih sayang-Nya pula kita dapat menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di Satuan Kerja kita ini, yaitu menyusun suatu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sebagai acuan atau panduan kerja selama kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan.

Keberadaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang ini berisikan penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan pembangunan sektor perhubungan, komunikasi dan informatika yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan kunci di daerah, isu-isu strategis pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018. Kami menyadari bahwa rencana strategis ini belum dapat menyajikan secara lengkap dan menyeluruh segenap aspek yang menyangkut rencana dan program kerja pada masing-masing bidang yang dilaksanakan oleh pelaku aktivitas, namun kita berharap rencana strategis yang tersaji dalam dokumen ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Dimasa mendatang, sangat diharapkan masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak demi penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018 ini.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG**

#### **2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dalam rangka melaksanakan kewenangan dibidang Komunikasi dan Informatika, maka berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016, ditetapkanlah tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, .

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah sebagai salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota Padang Panjang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang E-Government dan Teknologi Informasi;
4. Bidang Informasi Komunikasi Publik;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Persandian serta tugas pembantuan yang diberikan.
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian
- b. Pengelolaan program administrasi keuangan
- c. Pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan urusan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana serta Kehumasan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi

kepegawaian, hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, kehumasan.

- b. **Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

3. **Bidang E-Goverment dan Teknologi Informasi**, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pertambuan di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Statistik dan Persandian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program infrastruktur teknologi dan persandian
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program aplikasi informatika dan statistik.
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program layanan e-government.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang E-Government dan Teknologi Informasi terdiri dari :

- a. **Seksi Infrastruktur Teknologi dan Persandian**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Infrastruktur teknologi dan Persandian.
- b. **Seksi Aplikasi Informatika dan Statistik**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Aplikasi Informasi dan Statistik.
- c. **Seksi Layanan e-Goverment**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Layanan e-Government.

4. **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pertambuan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

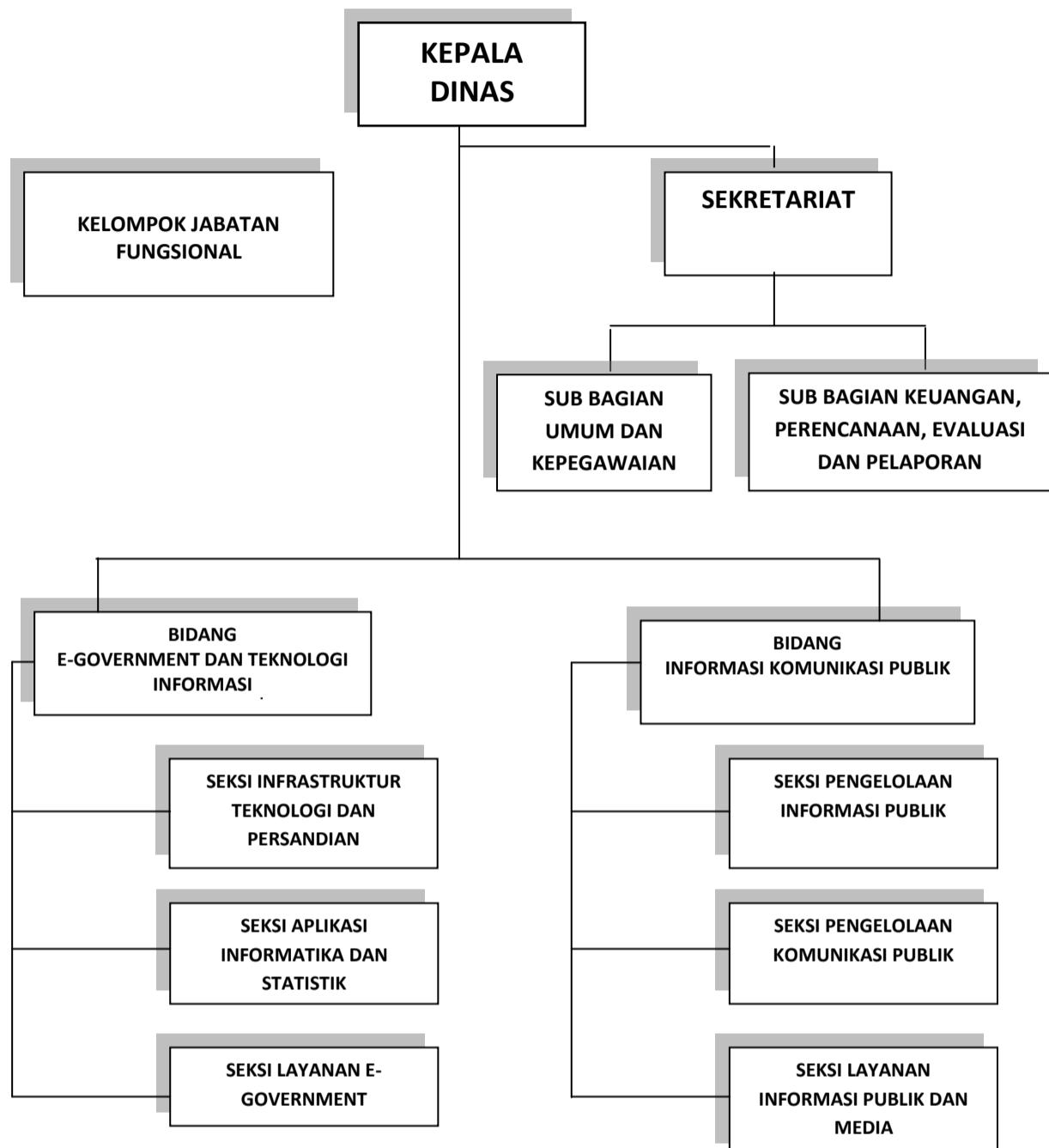
- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan informasi publik.
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan komunikasi publik.
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program layanan informasi publik dan media.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. **Seksi Pengelolaan Informasi Publik**, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di Lingkup Pemerintah Daerah.
- b. **Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengendalian komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di daerah.
- c. **Seksi Layanan Informasi Publik dan Media**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik dan hubungan dengan media.

## 5. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA PADANG PANJANG**



## **2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

Secara kuantitatif jumlah pegawai sebagai personil (aparatur) yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sehari-harinya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada awal tahun 2017, berjumlah sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) orang, yang ditempatkan pada sekretariat. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 18 orang atau 75 % berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan sebanyak 6 orang atau 25 % berstatus pegawai harian. Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang menunjukkan sebanyak 18 (delapan belas) orang atau 75 % berstatus pegawai negeri sipil yang telah menamatkan pendidikan kesarjanaan (D.III hingga S2).

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kebutuhan terhadap peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang masih sangat diperlukan, baik kebutuhan untuk mengenyam jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun kebutuhan terhadap pendidikan dan pelatihan teknis. Sumber daya manusia pegawai negeri sipil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berdasarkan tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1**  
**Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	2
3	Strata 1	9
4	Diploma 3	4
5	Diploma 2	-
6	Diploma 1	-
7	SLTA	3
8	SLTP	-
9	SD	-
	J u m l a h	18

Sedangkan sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dilihat dari tingkat kepangkatananya dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

**Tabel 2**

**Sumber Daya Manusia Aparatus Sipil Negara**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Berdasarkan Tingkat Kepangkatan**

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Pembina Utama Muda / IV.c	-
2	Pembina Tingkat I / IV.b	1
3	Pembina / IV.a	-
4	Penata Tingkat I / III.d	3
5	Penata / III.c	6
6	Penata Muda Tingkat I / III.b	2
7	Penata Muda / III.a	2
8	Pengatur Tingkat I / II.d	1
9	Pengatur / II.c	3
10	Pengatur Muda Tingkat I / II.b	-
11	Pengatur Muda / II.a	-
12	Juru Tingkat I / I.d	-
13	Juru / I.c	-
14	Juru Muda Tingkat I / I.b	-
15	Juru Muda / I.a	-
	J u m l a h	18

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna untuk menunjang kinerja pelayanan dilengkapi dengan beberapa sarana dan prasarana kerja yang tersedia adalah sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Sarana dan Prasarana Kerja**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**

NO	SERTIFIKASI BARANG	BANYAK BARANG	KEADAAN			KET
	NAMA/JENIS BARANG		B	RR	RB	
1	Kendaraan Roda 4	2	3	-	-	Unit
2	Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	Unit
3	Mesin Gerinda Tangan	-	-	-	-	Unit
4	Mesin Bor Tangan	-	-	-	-	Unit
5	Generator Set	-	-	-	-	Unit
6	Generator Set PKB	-	-	-	-	Unit

7	Kompresor & Speed Set	-	-	-	-	Unit
8	Kompresor PKB	-	-	-	-	Unit
9	Peralatan Pengujian PKB	-	-	-	-	Paket
10	Teropong	-	-	-	-	Unit
11	Mesin Ketik Olympia	-	-	-	-	Unit
12	Filling Cabinet	-	-	-	-	Unit
13	Brankas	-	-	-	-	Unit
14	Lemari Arsip	2	-	2	-	Unit
15	Papan Informasi	-	-	-	-	Buah
16	Papan Data (DUK & Bezetting)	-	-	-	-	Unit
17	Kursi Rapat	-	-	-	-	Buah
18	Kursi Sofa	-	-	-	-	Buah
19	Meja Komputer	-	-	-	-	Buah
20	Meja ½ Biro	2	2	-	-	Buah
21	Loudspeaker	-	-	-	-	Buah
22	UPS	-	-	-	-	Buah
23	Power Supply	-	-	-	-	Unit
24	Handy Cam	-	-	-	-	Unit
25	Televisi	-	-	-	-	Unit
26	Tangga Alumunium	-	-	-	-	Unit
27	Alat Pemadam	-	-	-	-	Tabung
28	Mesin Absensi	-	-	-	-	Unit
29	Komputer	3	2	-	1	Unit
30	Note Book	1	-	1	-	Unit
31	Monitor	-	-	-	-	Unit
32	KVM Switch	-	-	-	-	Unit
33	Repiter	-	-	-	-	Unit

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Hasil analisis terhadap Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika serta hasil telaahan terhadap RTRW berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika seiring dengan penggunaan anggaran, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam implementasi program pembangunan bidang Komunikasi dan Informasi serta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat beragam dan kompleks. Disamping itu hal yang tidak kalah beratnya adalah upaya pengendalian, pengawasan dan jasa komunikasi dan informatika. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan dilakukan dengan maksud untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan, baik ketertiban dalam beradministrasi maupun ketertiban dalam pelaksanaan pelayanan jasa.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang antara lain adalah :

1. Masih terbatasnya SDM yang sesuai dengan kompetensi Komunikasi dan Informasi guna mendukung implementasi program, pengawasan dan pengendalian di lapangan.
2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai tertib administrasi dan perizinan di bidang komunikasi dan informatika.

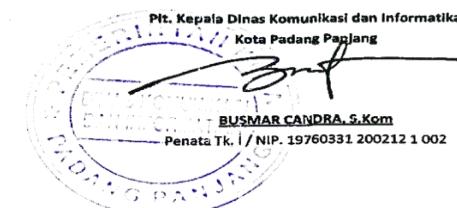
Dari permasalahan yang ada maka peluang yang bisa diambil yaitu :

1. Kebutuhan sarana komunikasi yang meningkat.

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI OPD**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target sesuai tupoksi OPD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke -		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa</b>				<b>356,310,000</b>	<b>3,043,250,000</b>	<b>2,318,660,000</b>	<b>245,809,857</b>	<b>2,167,955,817</b>	<b>2,159,946,600</b>	<b>0.69</b>	<b>0.71</b>	<b>0.93</b>
	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi			Terbentuknya kelompok informasi masyarakat di Kleurahan dan Kecamatan	14,585,000	417,370,000	78,860,000	6,845,000	410,254,200	70,498,000	0.47	0.98	0.89
	Pembinaan dan pengembangan sistem informasi			Tersedianya sistem informasi melalui website	195,775,000	281,260,000	256,000,000	177,022,857	216,758,617	255,050,000	0.90	0.77	1.00
	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi			Terwujudnya integritas komunikasi melalui smartcity di Kota Padang Panjang	145,950,000	130,910,000	346,840,000	61,942,000	104,915,000	330,636,100	0.42	0.80	0.95
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah			Tersedianya informasi melalui media sosial di Padang Panjang	-	2,213,710,000	1,636,960,000	-	1,436,028,000	1,503,762,500	-	0.65	0.92
2	<b>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>				<b>30,140,000</b>	<b>79,910,000</b>		<b>29,747,000</b>	<b>43,527,800</b>		<b>0.99</b>	<b>0.54</b>	-
	Pelatihan SDM Bidang Telekomunikasi dan Informasi			Meningkatnya pengetahuan aparatur di Lingkungan Pemko Padang Panjang	-	48,995,000	-	-	14,356,800	-	-	0.29	-
	Sosialisasi Komunikasi dan Informasi			Meningkatnya pengetahuan mengenai komunikasi dan informasi	30,140,000	30,915,000	-	29,747,000	29,171,000	-	0.99	0.94	-
3	<b>Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi</b>				-	<b>64,555,000</b>	<b>11,550,000</b>		<b>55,430,000</b>	<b>10,550,000</b>	-	<b>0.86</b>	<b>0.91</b>
	Pengawasan, pengendalian dan penertiban bidang pos dan telekomunikasi			Terlaksananya pengawasan terhadap telekomunikasi yang ada di Padang Panjang	-	64,555,000	11,550,000	-	55,430,000	10,550,000	-	0.86	0.91

Padang Panjang,  
2017



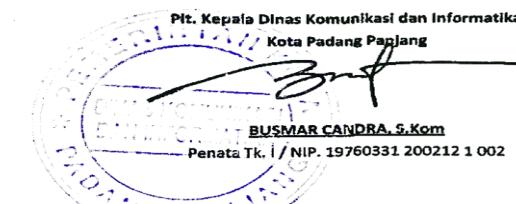
Pt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
 Kota Padang Panjang  
 BUSMAR CANDRA, S.Kom  
 Penata Tk. I / NIP. 19760331 200212 1 002

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI OPD**  
**DINAS KOMNIKASI DAN INFORMATIKA**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>356,310,000</b>	<b>3,043,250,000</b>	<b>2,318,660,000</b>	<b>245,809,857</b>	<b>2,167,955,817</b>	<b>2,159,946,600</b>	<b>0.69</b>	<b>0.71</b>	<b>0.93</b>	<b>5,718,220,000</b>	<b>4,573,712,274</b>
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	14,585,000	417,370,000	78,860,000	6,845,000	410,254,200	70,498,000	0.47	0.98	0.89	510,815,000	487,597,200
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	195,775,000	281,260,000	256,000,000	177,022,857	216,758,617	255,050,000	0.90	0.77	1.00	733,035,000	648,831,474
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	145,950,000	130,910,000	346,840,000	61,942,000	104,915,000	330,636,100	0.42	0.80	0.95	623,700,000	497,493,100
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	-	2,213,710,000	1,636,960,000	-	1,436,028,000	1,503,762,500	-	0.65	0.92	3,850,670,000	2,939,790,500
<b>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>30,140,000</b>	<b>79,910,000</b>	-	<b>29,747,000</b>	<b>43,527,800</b>	-	<b>0.99</b>	<b>0.54</b>	-	<b>110,050,000</b>	<b>73,274,800</b>
Pelatihan SDM Bidang Telekomunikasi dan Informasi	-	48,995,000	-	-	14,356,800	-	-	0.29	-	48,995,000	14,356,800
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi	30,140,000	30,915,000	-	29,747,000	29,171,000	-	0.99	0.94	-	61,055,000	58,918,000
<b>Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi</b>	-	<b>64,555,000</b>	<b>11,550,000</b>	-	<b>55,430,000</b>	<b>10,550,000</b>	-	<b>0.86</b>	<b>0.91</b>	<b>76,105,000</b>	<b>65,980,000</b>
Pengawasan, pengendalian dan penertiban bidang pos dan telekomunikasi	-	64,555,000	11,550,000	-	55,430,000	10,550,000	-	0.86	0.91	76,105,000	65,980,000

Padang Panjang,

2017



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG**

#### **2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dalam rangka melaksanakan kewenangan dibidang Komunikasi dan Informatika, maka berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016, ditetapkanlah tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, .

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah sebagai salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota Padang Panjang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang E-Government dan Teknologi Informasi;
4. Bidang Informasi Komunikasi Publik;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Persandian serta tugas pembantuan yang diberikan.
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian
- b. Pengelolaan program administrasi keuangan
- c. Pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan urusan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana serta Kehumasan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi

kepegawaian, hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, kehumasan.

- b. **Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

3. **Bidang E-Goverment dan Teknologi Informasi**, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pertambuan di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Statistik dan Persandian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program infrastruktur teknologi dan persandian
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program aplikasi informatika dan statistik.
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program layanan e-government.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang E-Government dan Teknologi Informasi terdiri dari :

- a. **Seksi Infrastruktur Teknologi dan Persandian**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Infrastruktur teknologi dan Persandian.
- b. **Seksi Aplikasi Informatika dan Statistik**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Aplikasi Informasi dan Statistik.
- c. **Seksi Layanan e-Goverment**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Layanan e-Government.

4. **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pertambuan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

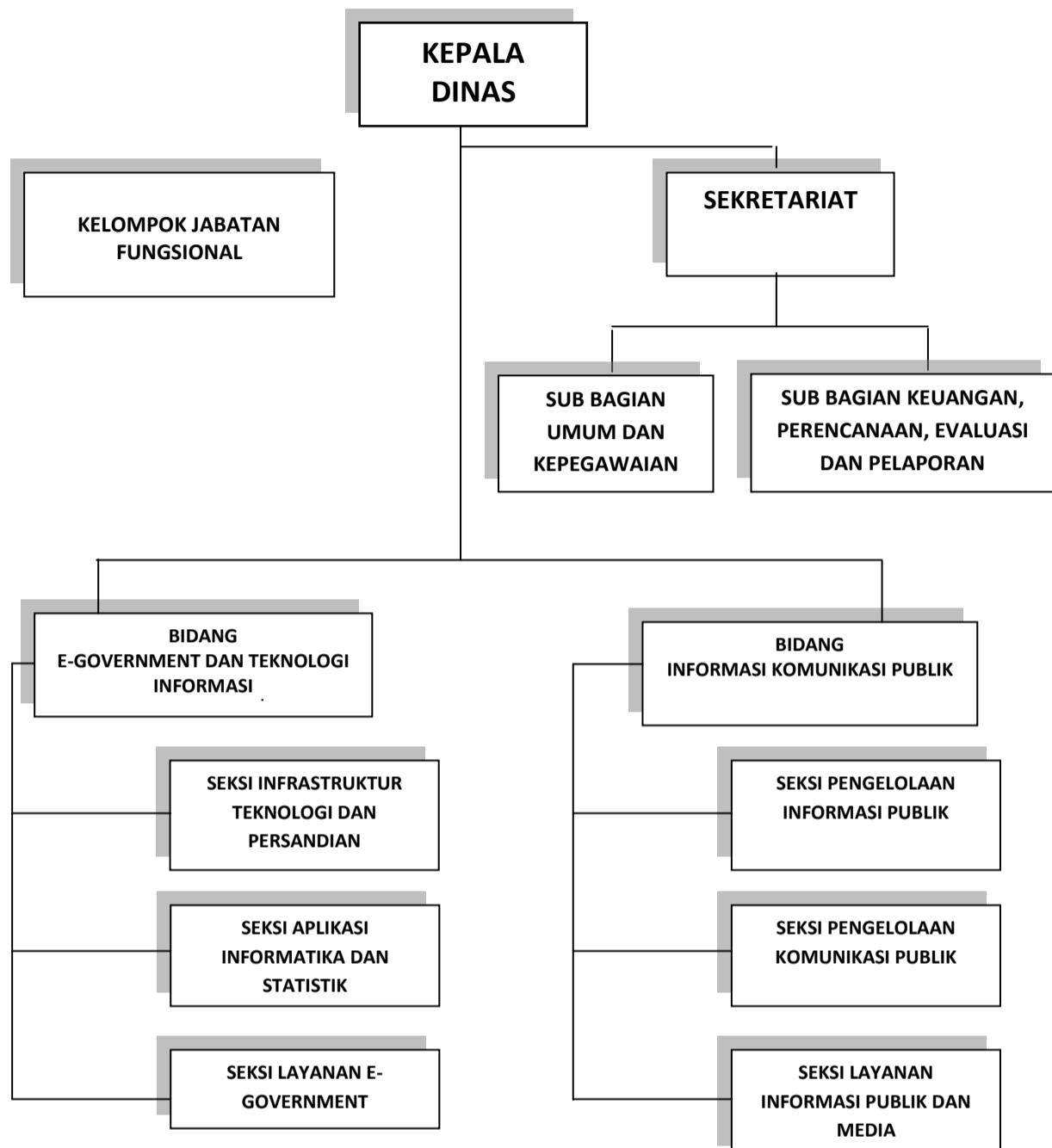
- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan informasi publik.
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan komunikasi publik.
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program layanan informasi publik dan media.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. **Seksi Pengelolaan Informasi Publik**, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di Lingkup Pemerintah Daerah.
- b. **Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengendalian komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di daerah.
- c. **Seksi Layanan Informasi Publik dan Media**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik dan hubungan dengan media.

## 5. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA PADANG PANJANG**



## **2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

Secara kuantitatif jumlah pegawai sebagai personil (aparatur) yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sehari-harinya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada awal tahun 2017, berjumlah sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) orang, yang ditempatkan pada sekretariat. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 18 orang atau 75 % berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan sebanyak 6 orang atau 25 % berstatus pegawai harian. Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang menunjukkan sebanyak 18 (delapan belas) orang atau 75 % berstatus pegawai negeri sipil yang telah menamatkan pendidikan kesarjanaan (D.III hingga S2).

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kebutuhan terhadap peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang masih sangat diperlukan, baik kebutuhan untuk mengenyam jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun kebutuhan terhadap pendidikan dan pelatihan teknis. Sumber daya manusia pegawai negeri sipil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berdasarkan tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1**  
**Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	2
3	Strata 1	9
4	Diploma 3	4
5	Diploma 2	-
6	Diploma 1	-
7	SLTA	3
8	SLTP	-
9	SD	-
	J u m l a h	18

Sedangkan sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dilihat dari tingkat kepangkatananya dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

**Tabel 2**

**Sumber Daya Manusia Aparatus Sipil Negara**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Berdasarkan Tingkat Kepangkatan**

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Pembina Utama Muda / IV.c	-
2	Pembina Tingkat I / IV.b	1
3	Pembina / IV.a	-
4	Penata Tingkat I / III.d	3
5	Penata / III.c	6
6	Penata Muda Tingkat I / III.b	2
7	Penata Muda / III.a	2
8	Pengatur Tingkat I / II.d	1
9	Pengatur / II.c	3
10	Pengatur Muda Tingkat I / II.b	-
11	Pengatur Muda / II.a	-
12	Juru Tingkat I / I.d	-
13	Juru / I.c	-
14	Juru Muda Tingkat I / I.b	-
15	Juru Muda / I.a	-
	J u m l a h	18

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna untuk menunjang kinerja pelayanan dilengkapi dengan beberapa sarana dan prasarana kerja yang tersedia adalah sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Sarana dan Prasarana Kerja**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**

NO	SERTIFIKASI BARANG	BANYAK BARANG	KEADAAN			KET
	NAMA/JENIS BARANG		B	RR	RB	
1	Kendaraan Roda 4	2	3	-	-	Unit
2	Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	Unit
3	Mesin Gerinda Tangan	-	-	-	-	Unit
4	Mesin Bor Tangan	-	-	-	-	Unit
5	Generator Set	-	-	-	-	Unit
6	Generator Set PKB	-	-	-	-	Unit

7	Kompresor & Speed Set	-	-	-	-	Unit
8	Kompresor PKB	-	-	-	-	Unit
9	Peralatan Pengujian PKB	-	-	-	-	Paket
10	Teropong	-	-	-	-	Unit
11	Mesin Ketik Olympia	-	-	-	-	Unit
12	Filling Cabinet	-	-	-	-	Unit
13	Brankas	-	-	-	-	Unit
14	Lemari Arsip	2	-	2	-	Unit
15	Papan Informasi	-	-	-	-	Buah
16	Papan Data (DUK & Bezetting)	-	-	-	-	Unit
17	Kursi Rapat	-	-	-	-	Buah
18	Kursi Sofa	-	-	-	-	Buah
19	Meja Komputer	-	-	-	-	Buah
20	Meja ½ Biro	2	2	-	-	Buah
21	Loudspeaker	-	-	-	-	Buah
22	UPS	-	-	-	-	Buah
23	Power Supply	-	-	-	-	Unit
24	Handy Cam	-	-	-	-	Unit
25	Televisi	-	-	-	-	Unit
26	Tangga Alumunium	-	-	-	-	Unit
27	Alat Pemadam	-	-	-	-	Tabung
28	Mesin Absensi	-	-	-	-	Unit
29	Komputer	3	2	-	1	Unit
30	Note Book	1	-	1	-	Unit
31	Monitor	-	-	-	-	Unit
32	KVM Switch	-	-	-	-	Unit
33	Repiter	-	-	-	-	Unit

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Hasil analisis terhadap Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika serta hasil telaahan terhadap RTRW berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika seiring dengan penggunaan anggaran, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam implementasi program pembangunan bidang Komunikasi dan Informasi serta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat beragam dan kompleks. Disamping itu hal yang tidak kalah beratnya adalah upaya pengendalian, pengawasan dan jasa komunikasi dan informatika. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan dilakukan dengan maksud untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan, baik ketertiban dalam beradministrasi maupun ketertiban dalam pelaksanaan pelayanan jasa.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang antara lain adalah :

1. Masih terbatasnya SDM yang sesuai dengan kompetensi Komunikasi dan Informasi guna mendukung implementasi program, pengawasan dan pengendalian di lapangan.
2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai tertib administrasi dan perizinan di bidang komunikasi dan informatika.

Dari permasalahan yang ada maka peluang yang bisa diambil yaitu :

1. Kebutuhan sarana komunikasi yang meningkat.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, menemui berbagai permasalahan, baik itu di bidang lalu lintas jalan, bidang angkutan jalan, bidang teknik sarana dan prasarana serta bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

##### **a. Bidang Komunikasi dan Informatika**

Di Bidang komunikasi dan informatika, kemampuan penerapan teknologi informasi yang masih rendah, serta permasalahan pengembangan Teknologi Informasi (TI) di dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah masih cukup terasa, antara lain :

1. Masih lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi (TI), sehingga pengumpulan, pengolahan, distribusi dan penyajian data dan informasi tidak terintegrasi.
2. Jumlah personil yang profesional dalam bidang teknologi informasi masih sangat minim, sehingga dalam pengelolaan teknologi informasi di lingkungan pemerintah tidak optimal.
3. Kurangnya penyajian data dan informasi untuk masyarakat dan pihak terkait melalui website SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
4. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasana serta fasilitas teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi faktor penghambat berkembangnya teknologi dan informasi ini.
5. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur jaringan teknologi informasi (intranet) yang ada oleh SKPD, sebagai sarana pertukaran, pengolahan data dan informasi.
6. Belum adanya pusat data (database) yang dipergunakan untuk menyimpan, merawat dan menyebarluaskan informasi yang berbasis teknologi informasi.
7. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara jasa komunikasi dan informatika.
8. Kurang optimalnya informasi program kegiatan pemerintah daerah pada masyarakat.
9. Kurang optimalnya pembinaan dan diseminasi terhadap penyelenggara pemerintah dan masyarakat yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika.
10. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Kepala Daerah Terpilih**

Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih periode 2013 – 2018

Visi : “**Kota Yang Maju, Lestari dan Islami**”

Misi :

1. Mewujudkan moralitas, kemandirian, dan daya saing masyarakat.

2. Mewujudkan Stabilitas dan Daya Saing Perekonomian
3. Mewujudkan lingkungan yang asri dan lestari
4. Mewujudkan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih

Berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika. Tugas pokok ini mencerminkan **misi keempat**, mewujudkan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana, dan **misi kelima**, mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi-fungsi yaitu penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah, perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika sesuai rencana strategis dinas, pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas, pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pembinaan dan pengembangan perhubungan darat, pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang komunikasi dan informatika. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pengembangan aplikasi telematika dan pendayagunaan teknologi informasi, pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pengawasan dan pengendalian, pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan.

Fungsi-fungsi yang diemban ini telah mencerminkan program-program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu program **a)** terbentuknya struktur kelembagaan pemerintahan yang efektif, efesien dan proporsional, yang disertai dengan kapasitas manajerial, aparatur, serta prasarana dan sarana pemerintah, **b)** meningkatnya jiwa kewirausahaan para aparatur pemerintah daerah, **c)** meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan termasuk dalam pengawasan dan pengendalian, **d)** terwujudnya supremasi hukum dan bertumbuh kembangnya budaya demokrasi, aman dan tertib, **e)** meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan daerah, **f)** meningkatkan pelayanan publik, dan **g)** meningkatnya keterpaduan antar instansi vertikal dan horizontal, yang mana program tersebut tertuang dalam misi kelima.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi

#### a. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika , maka kebijakan penyelenggaraan komunikasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancer dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informative dalam kerangka NKRI
2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi

3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa
4. Mengembangkan sistem kominfo berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan
5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global

Sasaran pembangunan pada akhir periode 2010 – 2014 yang telah dirumuskan akan dicapai melalui program-program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Komunikasi dan Informatika. Dengan memperhatikan sasaran dan arah kebijakan, program pembangunan pertama diarahkan pada penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya komunikasi dan informatika yang dalam hal ini popular disebut telematika (telekomunikasi, media, dan informatika) yang seoptimal mungkin.

Menciptakan kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan penyiaran pembangunan sarana dan prasarana telematika yang berbasis pada efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya, dilaksanakan melalui penguatan semua suara.

2. Program Pengembangan Aplikasi Informatika

Dalam mengupayakan semua sumber daya komunikasi dan informatika dapat berfungsi dan digunakan dilaksanakan dengan baik, diperlukan dukungan kapabilitas nasional baik SDM maupun industri melalui serangkaian program penguatan sumber daya manusia dan penguatan rantai pasok industri penunjang. Perwujudan kapabilitas nasional ini diarahkan pada penciptaan sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi tenaga ahli dan tenaga trampil untuk mengisi lapangan kerja di bidang komunikasi dan informatika, serta membina masyarakat agar mampu berperan aktif dalam lalu lintas komunikasi dan informatika baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun secara aktif berperan serta dalam percaturan kehidupan antar bangsa.

Terkait dengan hal tersebut, dalam pengembangan aplikasi telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka hal yang harus dikembangkan ialah pembangunan system layanan kepemerintahan (*e-Government*) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan system e-Government nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan public yang makin baik.

3. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

Pembentukan masyarakat informatif melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi, dilaksanakan oleh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat, menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat. Pembentukan program, pembentukan masyarakat informasi, dari sisi pasokan dilaksanakan melalui program penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi

pengembangan kapabilitas masyarakat dan program peningkatan implementasi e-Government sampai tingkat daerah. Sedang dari sisi kebutuhan, pembentukan masyarakat informasi dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat sehingga dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari informasi yang dikomunikasikan, termasuk penguasaan teknologi yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam kaitannya dengan sektor yang lain seperti : sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor kesehatan dan lingkungan hidup, sektor pendidikan, sektor pertahanan dan keamanan, sektor industri, perdagangan, dan tenaga kerja dll, maka bidang komunikasi dan informatika diarahkan pada penguatan kapasitas layanan informasi publik yang berkualitas dan penggunaan sumber daya yang seefesien mungkin melalui sinergi program dan integrasi proses komunikasi dan informatika. Pada akhirnya, ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat merupakan sebagai salah satu ciri khas masyarakat informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing.

#### 4. Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo

Dalam rangka mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan diperlukan dukungan penelitian dan pengembangan SDM kominfo. Penelitian dan pengembangan meliputi aspek-aspek regulasi, teknologi dan pasar. Untuk itu perlu didorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang kominfo. Di bidang pengembangan SDM kominfo diarahkan untuk penciptaan SDM unggul melalui serangkaian kegiatan pembangunan SDM Kominfo.

### **3.4 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Hasil telaahan terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis dan arah kebijakan ruang, menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang yang berada yang terletak pada titik silang arus lalu lintas, memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki potensi ekonomi, tidak saja berskala lokal maupun regional.

Beberapa potensi unggulan lokal Kota Padang Panjang antara lain sektor pariwisata, dan perdagangan serta sektor jasa. Adapun yang dimaksud dengan telaahan lingkungan hidup strategis yaitu dampak yang signifikan dalam pembangunan yang terkait status lingkungan kota dan tatanan sosial budaya masyarakat, pemerintah daerah wajib menyusun kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Tujuan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis adalah mensinergiskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan kota Padang Panjang dan menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai landasan penyusunan rencana, kebijakan dan program yang tertanam dalam RTRW Kota Padang Panjang.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, terdapat sejumlah isu strategis sebagai entry point atas kebutuhan antisipasi, penanggulangan, maupun tindak lanjut yang perlu diupayakan. Kapasitas kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang sejalan dengan terus bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Padang Panjang, perubahan terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen pemerintah untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam evaluasi pencapaian pembangunan daerah Kota Padang Panjang, keberhasilan pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan mengindikasikan semakin membaiknya kinerja pemerintah Kota Padang Panjang.

Demikian halnya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu perangkat kerja pemerintah Kota Padang Panjang, keberadaannya turut menentukan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sejauh ini. Namun, keberhasilan pembangunan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berkaitan dengan adanya keterbatasan sumber daya, baik berupa dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Seiring dengan kondisi tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, memiliki tanggungjawab yang strategis terhadap keberhasilan pembangunan di bidang tersebut. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan di bidang tersebut, karenanya diperlukan upaya untuk terus meningkatkan kemampuan manajerial dalam merencanakan dan mengelola kegiatan-kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, meningkatkan pemahaman dan kemampuan (keahlian) aparat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, meningkatkan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai dan mutakhir, serta dukungan ketersediaan data dan informasi yang lengkap, akurat dan terkini.

Adapun isu-isu yang saat ini berkembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, yang pada tentunya juga menunjang terhadap visi dan misi Walikota Padang Panjang terpilih periode 2013 – 2018, meliputi :

#### **a. Bidang E-Goverment dan Teknologi Informasi**

1. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program infrastruktur teknologi dan persandian
2. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program aplikasi informatika dan statistik.
3. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program layanan e-government.

**b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

1. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan informasi publik.
2. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan komunikasi publik.
3. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program layanan informasi publik dan media.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Visi dan Misi**

Memasuki periode pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 5 (lima) tahun kedua (2013 – 2018), Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah Kota Padang Panjang merupakan salah satu SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah) yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya “**KOTA PADANG PANJANG YANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA**”. Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicitakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada periode 2017 – 2018.

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Kota Padang Panjang 2017 – 2018, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan (keadaan) yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada periode 2017 – 2018 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya Kota Padang Panjang yang Amanah, Aman dan Sejahtera, tentunya dilandasi oleh isu strategis sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dimasa mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dalam bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat.

Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang menetapkan visi 2017 – 2018 sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu :

**“ Terselenggaranya Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Padang Panjang”**

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2017 – 2018 maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berkaitan dengan penetapan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang 2017 – 2018, maka perlu diperhatikan Misi Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika 2017 – 2018 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang. Untuk itu, dalam mengapresiasikan upaya mendukung pelaksanaan misi pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
3. Meningkatkan kualitas penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintah daerah.

## **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berdasarkan rumusan misi sebagaimana tertuang diatas adalah sebagai berikut:

### **1. Misi Pertama :**

Meningkatkan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur memiliki tujuan untuk meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja kelembagaan.
- b. Meningkatkan prasarana dan sarana kerja yang memadai.
- c. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM aparatur.

### **2. Misi Kedua :**

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta pos dan telekomunikasi.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan Mekanisme dan Prosedur Standar Layanan Informasi Publik
- b. Menyediakan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
- c. Meningkatkan Kapasitas dan Kuantitas Layanan Informasi Publik
- d. Menyediakan Konten Layanan Informasi Publik

### **3. Misi Ketiga :**

Meningkatkan kualitas penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintah daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Meningkatkan kualitas sistem aplikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintahan.

- c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan bersama komunitas teknologi informasi dan komunikasi berbasis potensi lokal, regional dan nasional.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

**Tabel 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke</b>				
				<b>1(2014)</b>	<b>2(2015)</b>	<b>3(2016)</b>	<b>4(2017)</b>	<b>5(2018)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1	Meningkatkan Kelembagaan dan SDM Aparatur Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional	Meningkatnya pelayanan dan kualitas kinerja aparatur	Persentase terlaksananya jasa layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase aparatur yang mengikuti bimtek	20%	20%	20%	30%	30%
		Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan	Persentase laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.	Meningkatnya akses dan kualitas informasi publik	Persentase OPD yang memanfaatkan media dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan	50%	60%	70%	80%	100%

3.	Meningkatkan kualitas penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintah daerah.	Terwujudnya pengembangan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan internet	60%	70%	80%	90%	100%
----	--	---	--	-----	-----	-----	-----	------

## **4.3 Strategi dan Kebijakan SOPD**

### **4.3.1 Analisis Lingkungan Internal**

Dalam upaya menciptkan pelayanan publik dan mewujudkan visi, dan misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) perlu adanya pengkajian permasalahan. Metoda yang digunakan dalam pengkajian permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi 2 (dua) tahun kedepan tersebut mempergunakan konsep dan prinsip manajemen strategis (Analisis Swot) yang meliputi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (threats). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan adalah sebagai berikut :

#### **a. Kekuatan (Strength)**

Landasan utama yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan dimasa mendatang yang terdapat pada sisi kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sebagai sesuatu kekuatan meliputi :

1. Pengakuan eksistensi dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
2. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintah dalam penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika.

#### **b. Kelemahan (Weakness)**

Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang meliputi :

1. Kompetensi SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan bidang komunikasi dan informatika perlu didukung sumber daya manusia yang profesional dan mampu mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain melalui penambahan jumlah aparatur, juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesional melalui diklat-diklat teknis perhubungan dan diklat atau bintek teknologi informasi dan komunikasi.
2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai. Dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan sarana dan prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pelayanan sektor komunikasi dan informatika memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika baik melalui APBD maupun APBN.
4. Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hal yang harus diselesaikan bersama.

#### **4.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal**

Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang meliputi :

##### **a. Peluang (Opportunity)**

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
2. Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan.
3. Semakin bertumbuhkembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang komunikasi dan informatika

##### **b. Ancaman (Treathe)**

Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/prasarana.
2. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara komunikasi dan informatika.
3. Kurang optimalnya informasi program kegiatan pemerintah daerah pada masyarakat.
4. Kurang optimalnya pembinaan dan diseminasi terhadap penyelenggara pemerintah dan masyarakat yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika.

5. Kurangnya koordinasi pembangunan dan pengembangan teknologi informasi oleh SOPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan bidang komunikasi dan informatika.
6. Belum optimalnya penyelenggaran pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, dengan indikator sasaran. Sebagai tolak ukur keberhasilan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang menetapkan rencana program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan ;
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  6. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
  7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik penerangan Bangunan Kantor
  9. Penyediaan Makanan dan Minuman
  10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan ;
  1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan ;
  1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan;
  1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
  3. Penyusunan Pelaporan Pronogsis Realisasi Anggaran
  4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 6) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan;
  1. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Kota Padang Panjang
  2. Fasilitasi Pemilihan Media Tradisional
  3. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
  4. Pengadaan dan Operasional Sarana dan Prasarana Data Center/Command Center/Call Center

5. Pengelolaan dan Perlindungan Informasi dengan pemanfaatan persandian di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
  6. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi
  7. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi
  8. Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komite TIK (Komite TIK)
  9. Pengelolaan Website Pemerintah Kota Padang Panjang
  10. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
  11. Pendidikan dan Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
  12. Operasional Maintenance LPSE
  13. Penyusunan rencana induk E-Goverment
  14. Penayangan Dialog Interaktif
  15. Pemberdayaan Jaringan Komunikasi Sosial
  16. Pengelolaan Konten Videotron
  17. Pengelolaan konten Website
- 7) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan;
1. Pelatihan SDM dalam Bidang Teknologi Informasi
- 8) Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa, dengan kegiatan ;
1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
  2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

**TABEL 5.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB	lokasi		
									TAHUN-4 (2017)		TAHUN-5 (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		5		6	7	14	15	16	17		18	19	20		
			02	10	01	01	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran		627,225,000		735,294,000						
Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan prasarana dan sarana kerja yang memadai	Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran	02	10	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan meterai dinas 150 lb meterai 3000, 255 meterai 6000	0%	90%	1,875,000	90%	1,980,000	100%	1,980,000	Sekretariat	P. Panjang
Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan prasarana dan sarana kerja yang memadai	Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran	02	10	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya tagihan rekening listrik kantor, videotron, running tex, air dan telepon	0%	100%	90,600,000	100%	90,600,000	100%	90,600,000	Sekretariat	P. Panjang
Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan prasarana dan sarana kerja yang memadai	Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran	02	10	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional untuk 12 bulan	0%	80%	177,450,000	80%	208,314,000	100%	208,314,000	Sekretariat	P. Panjang
Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja kelembagaan	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja kelembagaan	02	10	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan	0%	100%	58,300,000	100%	80,400,000	100%	80,400,000	Sekretariat	P. Panjang
Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan prasarana dan sarana kerja yang memadai	Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran	02	10	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan tenaga harian lepas 8 orang	0%	80%	147,000,000	80%	170,000,000	100%	170,000,000	Sekretariat	P. Panjang

Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan prasarana dan sarana kerja yang memadai	Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran	02 10 01 01 10 6	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor selama 1 tahun	0%	30%	12,000,000	30%	24,000,000	100%	24,000,000	Sekretariat	P. Panjang
Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan prasarana dan sarana kerja yang memadai	Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran	02 10 01 01 11 7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	0%	80%	10,500,000	80%	20,000,000	100%	20,000,000	Sekretariat	P. Panjang
Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan prasarana dan sarana kerja yang memadai	Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran	02 10 01 01 12 8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan alat listrik dan penerangan kantor selama 1 tahun	0%	80%	2,000,000	80%	2,500,000	100%	2,500,000	Sekretariat	P. Panjang
Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja kelembagaan	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja kelembagaan	02 10 01 01 17 9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya penyediaan makan dan minum rapat selama 1 tahun	0%	100%	37,500,000	100%	37,500,000	100%	37,500,000	Sekretariat	P. Panjang
Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan koperasi dan kemampuan sumber daya manusia dan aparatur	Rasio peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur	02 10 01 01 18 10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terikutinya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah	0%	70%	90,000,000	70%	100,000,000	100%	100,000,000	Sekretariat	P. Panjang
			02 10 01 02	II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				12,000,000		1,430,000,000				
Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan koperasi dan kemampuan sumber daya manusia dan aparatur	Rasio peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur	02 10 01 02 05 11	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional sebanyak 3 unit roda 4 dan 8 unit kendaraan roda 2	-	-	-	3 unit roda 4 dan 8 unit roda 2	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	Sekretariat	P. Panjang

Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan koperasi dan kemampuan sumber daya manusia dan aparatur	Rasio peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur	02 10 01 02 07 12	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya fasilitas perlengkapan gedung kantor berupa 5 unit lemari, 1 unit cash box, 4 unit komputer, 4 unit notebook, meja dan kursi kerja	-	-	-	lemari arsip, komputer, meja dan kursi	320,000,000	100%	320,000,000	Sekretariat	P. Panjang
Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan koperasi dan kemampuan sumber daya manusia dan aparatur	Rasio peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur	02 10 01 02 22 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	50%	1 paket	7,000,000	1 paket	100,000,000	100%	100,000,000	Sekretariat	P. Panjang
Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan koperasi dan kemampuan sumber daya manusia dan aparatur	Rasio peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur	02 10 01 02 30 14	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Terpenuhinya peralatan kantor yang diperbaiki	0%	1 paket	5,000,000	1 paket	10,000,000	100%	10,000,000	Sekretariat	P. Panjang
			02 10 01 03	III Peningkatan Disiplin Aparatur				-		35,000,000				
Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan koperasi dan kemampuan sumber daya manusia dan aparatur	Rasio peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur	02 10 01 03 05 15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai sebanyak 80 stell	0%	-	-	80 stell	35,000,000	100%	35,000,000	Sekretariat	P. Panjang
			02 10 01 05	IV Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				12,000,000		36,000,000				
Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan koperasi dan kemampuan sumber daya manusia aparatur	Terpenuhinya aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis	02 10 01 05 03 16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan aparatur untuk 10 orang	0%	4 orang	12,000,000	12 orang	36,000,000	100%	36,000,000	Sekretariat	P. Panjang
			02 10 01 06	V Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				326,000		326,000				

Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja kelembagaan	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja kelembagaan	02 10 01 06 01 17	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja OPD selama 12 bulan	0%	1 Lap	81,500	1 Lap	81,500	100%	81,500	Sekretariat	P. Panjang	
Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja kelembagaan	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja kelembagaan	02 10 01 06 02 18	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran 2 laporan	0%	2 Lap	81,500	2 Lap	81,500	100%	81,500	Sekretariat	P. Panjang	
Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja kelembagaan	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja kelembagaan	02 10 01 06 03 19	Penyusunan pelaporan pronostis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	0%	1 Lap	81,500	1 Lap	81,500	100%	81,500	Sekretariat	P. Panjang	
Meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja kelembagaan	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja kelembagaan	02 10 01 06 04 20	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 1 laporan	0%	1 Lap	81,500	1 Lap	81,500	100%	81,500	Sekretariat	P. Panjang	
			02 10 01 15	VI	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			3,832,685,000		7,108,785,000					
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan kapasitas dan kuantitas layanan informasi publik	Rasio meningkatnya aksesibilitas serta kapasitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	02 10 01 15 02 21	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terbentuknya kelompok informasi masyarakat di kelurahan dan kecamatan	30%	4 klp	99,785,000	8 klp	75,000,000	100%	75,000,000	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	P. Panjang	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan kapasitas dan kuantitas layanan informasi publik	Rasio meningkatnya aksesibilitas serta kapasitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi		Fasilitasi pemilihan media tradisional	Mengikuti pemilihan media tradisional tingkat propinsi dan nasional	-	-	-	2 kali keg	99,785,000	100%	99,785,000	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	P. Panjang	

Meningkatkan kualitas penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas sistem aplikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintahan	Rasio penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berbasis TI di lingkungan pemerintah daerah	02 10 01 15 03 23	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Tersedianya bandwith beserta manajemen pengelolaan bandwith untuk seluruh OPD di Kota Padang Panjang	25%	1 paket	268,725,000	1 paket	1,050,000,000	100%	1,050,000,000	Bidang E-Government dan Teknologi Informasi	P. Panjang
Meningkatkan kualitas penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas sistem aplikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintahan	Rasio penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berbasis TI di lingkungan pemerintah daerah		Pengadaan dan operasional sarana dan prasarana data center/commend center/call center	Tersedianya sarana dan prasarana beserta manajemen pengelolaan data center/commend center dan call center untuk 1 tahun	-	-	-	1 paket data center	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	Bidang E-Government dan Teknologi Informasi	P. Panjang
Meningkatkan kualitas penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintah daerah	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi	Rasio pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah		Pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfaatan persandian di lingkungan pemerintah kota padang panjang	Terlaksananya pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfaatan persandian pada semua OPD	-	-	-	24 OPD	125,000,000	100%	125,000,000	Bidang E-Government dan Teknologi Informasi	P. Panjang
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik	Rasio meningkatnya aksesibilitas serta kapasitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi		Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi	Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan untuk jaringan FO, radio, CCTV dan running text	-	-	-	12 bulan	325,000,000	100%	325,000,000	Bidang E-Government dan Teknologi Informasi	P. Panjang
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik	Rasio meningkatnya aksesibilitas serta kapasitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	02 10 01 15 05 27	Pembinaan dan pengembangan sistem informasi	Terwujudnya integritas sistem informasi beserta manajemen pengelolaan smart city kota padang panjang	35%	10 aplikasi	1,105,040,000	10 aplikasi	1,500,000,000	100%	1,500,000,000	Bidang E-Government dan Teknologi Informasi	P. Panjang

Meningkatkan kualitas penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi	Rasio peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta peningkatan pembinaan komunitas TIK					28	Penyelenggaraan komite teknologi informasi dan komite (Komite TIK)	Tersusunnya perwako penyelenggaraan E-Gov dan terbentuknya Tim Pengelola E-Gov Kota Padang Panjang	-	-	-	1 paket	125,000,000	100%	125,000,000	Bidang E-Government dan Teknologi Informasi	P. Panjang	
Meningkatkan kualitas penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintahan	Meningkatkan kualitas sistem aplikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintahan	Rasio penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berbasis TI di lingkungan <b>pemerintah daerah</b>					29	Pengelolaan website pemerintah kota padang	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan website dan tersedianya dana untuk sewa hosting	-	-	-	12 bulan	125,000,000	100%	125,000,000	Bidang E-Government dan Teknologi Informasi	P. Panjang	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Menyediakan konten layanan informasi publik	Rasio meningkatnya aksesibilitas serta kapasitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	02	10	01	15	11	30	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tersedianya dukungan dana untuk pemeliharaan dan perawatan rutin dan berkala media visual elektronik dan pemeliharaan audio visual	30%	2 paket	2,125,725,000	4 unit	350,000,000	100%	350,000,000	Bidang E-Government dan Teknologi Informasi	P. Panjang
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Menyediakan mekanisme dan prosedur standar layanan informasi publik	Rasio meningkatnya aksesibilitas serta kapasitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi					31	Pendidikan dan sosialisasi layanan pengadaan secara elektronik	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan pengadaan secara elektronik(SPSE, SIRUP, monev, online)	-	-	-	90 orang	50,000,000	100%	50,000,000	Bidang E-Government dan Teknologi Informasi	P. Panjang	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Menyediakan mekanisme dan prosedur standar layanan informasi publik	Rasio meningkatnya aksesibilitas serta kapasitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi					32	Operasional maintenance LPSE	Terlaksananya proses registrasi, verifikasi, pelelangan/seleksi secara elektronik	-	-	-	1 paket	350,000,000	100%	350,000,000	Bidang E-Government dan Teknologi Informasi	P. Panjang	

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Menyediakan mekanisme dan prosedur standar layanan informasi publik	Rasio meningkatnya aksesibilitas serta kapasitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi						33	Penyusunan rencana induk E-Government	Tersedianya dokumen master plan E-Government	-	-	-	1 dokumen	500,000,000	100%	500,000,000	Bidang E-Government dan Teknologi Informasi	P. Panjang
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Menyediakan konten layanan informasi publik	Rasio meningkatnya aksesibilitas serta kapasitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	02	10	01	15	12	34	Penayangan dialog interaktif	penayangan dialog interaktif pada media televisi sebanyak 6 kali tayang televisi lokal dan 2 kali nasional	30%	6 kali tayang	159,360,000	6 kali tayang	230,000,000	100%	230,000,000	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	P. Panjang
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Menyediakan konten layanan informasi publik	Rasio meningkatnya aksesibilitas serta kapasitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	02	10	01	15	13	35	Pemberdayaan jaringan komunikasi sosial	Terlaksananya pengelolaan jaringan sosial media pemerintah kota padang panjang untuk 4 media sosial (FB, Instagram, Twitter dan Youtube)	30%	4 sosed	74,050,000	4 sosed	98,000,000	100%	98,000,000	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	P. Panjang
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Menyediakan konten layanan informasi publik	Rasio meningkatnya aksesibilitas serta kapasitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi						36	Pengelolaan konten videotron	Terlaksananya pengelolaan konten 4 unit videotron sebanyak 60 kali	-	-	-	60 kali	53,000,000	100%	53,000,000	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	P. Panjang
Meningkatkan kualitas penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintahan	Meningkatkan kualitas sistem aplikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintahan	Rasio penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berbasis TI di lingkungan <u>pemerintah daerah</u>						37	Pengelolaan konten website	Terlaksananya pengelolaan website pemerintah kota padang panjang sebanyak 120 kali	-	-	-	120 kali	53,000,000	100%	53,000,000	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	P. Panjang
			02	10	01	17		VII	Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi					58,965,000			200,000,000		

Meningkatkan kualitas penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi	Rasio peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta peningkatan pembinaan komunitas TIK	02 10 01 17 04 38	Pelatihan SDM dalam bidang teknologi informasi	Terlaksananya bintek dan trainning aplikasi bagi aparatur di lingkungan pemko padang panjang	30%	semua pejabat struktural dan masyarakat	58,965,000	semua pejabat struktural dan masyarakat	200,000,000	100%	200,000,000	Bidang E-Government dan Teknologi Informasi	P. Panjang	
			02 10 01 18	VII Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				58,385,000		1,880,000,000					
Meningkatkan kualitas penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintah daerah	Meningkatkan kerjasama dan kemitraan bersama komunitas teknologi informasi dan komunikasi berbasis potensi lokal, regional dan nasional	Rasio peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta peningkatan pembinaan komunitas TIK		39	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terlaksananya publikasi kegiatan pembangunan melalui media cetak lokal dan nasional	-	-	-	Berlangganan 50 media cetak	1,430,000,000	100%	1,430,000,000	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	P. Panjang
Meningkatkan kualitas penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintah daerah	Meningkatkan kerjasama dan kemitraan bersama komunitas teknologi informasi dan komunikasi berbasis potensi lokal, regional dan nasional	Rasio peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta peningkatan pembinaan komunitas TIK		40	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terlaksananya permintaan informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik kepada masyarakat	-	-	-	12 bulan	150,000,000	100%	150,000,000	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	P. Panjang
Meningkatkan kualitas penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintah daerah	Meningkatkan kerjasama dan kemitraan bersama komunitas teknologi informasi dan komunikasi berbasis potensi lokal, regional dan nasional	Rasio pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah		41	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Terlaksananya sosialisasi kegiatan dan kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang	-	-	-	Cetak buku agenda, spanduk	300,000,000	100%	300,000,000	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	P. Panjang
-	-	-	02 10 01 18 05	42	Pengawasan, pengendalian dan penertiban bidang POS dan Telekomunikasi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan menara telekomunikasi dan warung internet	30%	1 tahun	58,385,000	-	-	100%	-	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	P. Panjang
					JUMLAH		4,601,586,000		11,425,405,000						

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, dengan indikator sasaran. Sebagai tolak ukur keberhasilan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang menetapkan rencana program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan ;
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  6. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
  7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik penerangan Bangunan Kantor
  9. Penyediaan Makanan dan Minuman
  10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan ;
  1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan ;
  1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan;
  1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
  3. Penyusunan Pelaporan Pronogsis Realisasi Anggaran
  4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 6) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan;
  1. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Kota Padang Panjang
  2. Fasilitasi Pemilihan Media Tradisional
  3. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
  4. Pengadaan dan Operasional Sarana dan Prasarana Data Center/Command Center/Call Center

5. Pengelolaan dan Perlindungan Informasi dengan pemanfaatan persandian di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
  6. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi
  7. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi
  8. Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komite TIK (Komite TIK)
  9. Pengelolaan Website Pemerintah Kota Padang Panjang
  10. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
  11. Pendidikan dan Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
  12. Operasional Maintenance LPSE
  13. Penyusunan rencana induk E-Goverment
  14. Penayangan Dialog Interaktif
  15. Pemberdayaan Jaringan Komunikasi Sosial
  16. Pengelolaan Konten Videotron
  17. Pengelolaan konten Website
- 7) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan;
1. Pelatihan SDM dalam Bidang Teknologi Informasi
- 8) Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa, dengan kegiatan ;
1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
  2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang untuk periode 2017 – 2018 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sejalan dengan hal tersebut kebijakan umum pada program prioritas untuk misi pertama yang menetapkan tata kelola pemerintahan yang amanah dan anti KKN dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien dengan sasaran :

1. Meningkatkan tatalaksana pengelolaan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien dengan strategi penerapan prosedur kerja yang mantap dan berseri-energi antar OPD, dengan arah kebijakan menyusun dan menerapkan SPM, membangun dan mengembangkan sistem dan manajemen publik, sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis teknologi informasi serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja :
  - meningkatnya prosentase OPD yang telah menerapkan SPM
  - meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan pemerintah daerah berdasarkan kriteria hasil survei indeks kepuasan masyarakat
  - terwujudnya pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi
  - terwujudnya penerapan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PPMRB)
  - meningkatnya kinerja penilaian evaluasi LAKIP
  - dipertahankannya opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah
  - meningkatnya prosentase OPD yang mendapatkan nilai sangat baik dalam evaluasi kinerja.
2. Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi, dengan strategi peningkatan kualitas pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas, dengan arah kebijakan mendorong penerapan pelaksanaan tupoksi, dengan indikator meningkatnya persentase pelaksanaan tupoksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya kebijakan umum pada program prioritas untuk misi ketiga, dengan tujuan peningkatan pelayanan berbasis masyarakat, dengan sasaran peningkatan PHBS dengan strategi meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dengan arah kebijakan mengintensifkan sosialisasi kesehatan pada masyarakat, dengan indikator kinerja penyempurnaan capaian 8 tatanan kota sehat.

Guna menunjang kebijakan umum dan program prioritas untuk misi **ketiga**, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infra struktur kota, dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkotaan, dengan strategi :

Mengembangkan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, dengan arah kebijakan membangun infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, dengan

indikator kinerja out comes meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi komunikasi, berupa;

a. Untuk infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi, yakni:

- Memetakan dan Menyusun Topologi System Jaringan Komunikasi
- Menyediakan dan Memelihara Sarana dan Prasarana Sistem Jaringan Komunikasi Berbasis Teknologi Informasi Terkini
- Mengelola dan Mengendalikan Lalu Lintas Data dan Komunikasi Internet
- Meningkatkan Kapasitas Aksesibilitas (Bandwidth) Sistem Jaringan

b. Untuk aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, yakni:

- Menyusun Standarisasi Perangkat Lunak dan Perangkat Keras
- Menyusun Standar Basis Data
- Menyusun Mekanisme Interoperabilitas Antar Data dan Aplikasi
- Menyediakan Server Basis Data dan Aplikasi
- Menyediakan Aplikasi baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile
- Melakukan Tuning (optimalisasi) Aplikasi dan Basis Data untuk mempercepat aksesibilitas
- Menyediakan dan Memelihara Data Center

c. Untuk komunitas teknologi informasi dan komunikasi, yakni:

- Pendataan dan Seleksi Komunitas
- Pembinaan Komunitas
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Komunitas
- Pemberdayaan Komunitas

Dimana pada kondisi awal tahun 2013 sekitar 30%, dan diharapkan kondisi akhir tahun 2018 sudah mencapai sekitar 70% untuk mencapai kinerja sebagaimana tersebut telah disusun program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan :

- Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Kota Padang Panjang
- Fasilitasi Pemilihan Media Tradisional
- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
- Pengadaan dan Operasional Sarana dan Prasarana Data Center/Command Center/Call Center
- Pengelolaan dan Perlindungan Informasi dengan pemanfaatan persandian di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi
- Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi
- Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komite (Komite TIK)
- Pengelolaan Website Pemerintah Kota Padang Panjang
- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

- Pendidikan dan Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
  - Operasional Maintenance LPSE
  - Penyusunan rencana induk E-Goverment
  - Penayangan Dialog Interaktif
  - Pemberdayaan Jaringan Komunikasi Sosial
  - Pengelolaan Konten Videotron
  - Pengelolaan konten Website
- b. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan :
- Pelatihan SDM dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- c. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa, dengan kegiatan
- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
  - Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  - Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

**Tabel 6.1**  
**INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2013	Tahun 2017	Tahun 2018		
1	2	3	4	5	6	
	<b>Misi 1</b>					
1	<b>Meningkatnya Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien</b>	25%	50%	80%	100%	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	30%	60%	85%	100%	
	Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	30%	60%	85%	100%	
2	<b>Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah</b>					
	Pengembangan Data/Informasi	30%	45%	75%	80%	
	<b>Misi 4</b>					
1	<b>Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi</b>					
	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	25%	45%	75%	80%	
	<b>Misi 5</b>					
1	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan</b>					
	Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi dan informasi	30%	45%	70%	70%	

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Atas berkah dan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, disusun sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Strategis Kota Padang Panjang. Penyusunan rencana strategis ini tidak semata mempertimbangkan pihak pemerintah Kota Padang Panjang semata, tapi memperhatikan aspirasi masyarakat. Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi organisasi selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2018 sehingga organisasi dapat menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan secara terpadu, terkendali, terarah dan berkesinambungan.

Sebaik apapun suatu rencana dibuat dan seberapa banyak anggaran yang diserap, tanpa didukung dengan tekad, semangat dan kesadaran semua pihak serta kemauan yang sungguh-sungguh (political will) dari pemegang wewenang untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya maka suatu tujuan akan sulit untuk dicapai.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan asset yang sangat penting dalam pembangunan, dan semua itu tidak semata-mata menjadi beban tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang saja, akan tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut cukup beralasan mengingat peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tugas koordinasi diantara pihak-pihak terkait.

Dengan Rencana Strategis ini diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka peningkatan kapabilitas institusi, khususnya dalam sudut pandang masyarakat. Untuk mewujudkan berbagai harapan tersebut, diperlukan waktu, konsistensi dan komitmen serta integritas yang tinggi dari berbagai pihak yang terlibat di dalam kehidupan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

Dengan adanya Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dapat terlaksana lebih terarah dan didukung lingkungan organisasi yang kondusif, pelaksanaan pelayanan dan pendayagunaan ke depan dapat berjalan dengan lebih sistematis dan lebih baik.

